

PERAN MAJALAH HIBURAN *VARIA* DALAM MENYEBARKAN WACANA KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU PADA TAHUN 1967-1972

Sunardi

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
sunardicules@gmail.com

Abstrak

Majalah hiburan *Varia* adalah majalah hiburan tanah air yang lahir pada 23 April 1958. Kehadiran majalah ini mampu menjadi angin segar bagi dunia pers. Meski sebagai majalah hiburan, *Varia* tidak bisa lepas dari politik pemerintahan. Sejak masa pemerintahan Sukarno sampai Suharto majalah hiburan *Varia* menunjukkan eksistensinya di Indonesia. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui perkembangan majalah hiburan *Varia* sejak pertama kali berdiri, perannya dalam perpolitikan nasional, dan mengetahui penyebab majalah hiburan *Varia* bisa bertahan di dua masa pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yakni heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majalah hiburan *Varia* telah mengalami perkembangan mulai dari tahun 1958 sampai 1972. Majalah hiburan yang terbit tiap hari Rabu ini telah mempunyai peran besar dalam persebaran wacana politik setiap pemerintahan. Meskipun mampu berkembang dan mempunyai peran dalam politik pemerintahan, eksistensi majalah hiburan *Varia* tidak lebih sebagai jalan supaya mampu bertahan menghidupi perusahaan.

Kata Kunci: Perkembangan, Peran, Wacana, *Varia*.

Abstract

Varia magazine was an Indonesia's entertainment magazine born in April, 23 1958. The presence of this magazine can be a fresh air in the press world. Even though it was an entertainment magazine, Varia cannot be separated from Indonesia's politics. Since Sukarno to Suharto's reign, Varia showed its existence in Indonesia. This study aimed to know the development of Varia magazine since it was founded, the roles in Indonesia's politics, and the reason why it can survive in the two period of reign. This study used historical method, which were heuristic, verification, interpretation, and historiography. The results of this study show that Varia magazine had been through development from 1958 to 1972. This Wednesday magazine has big roles in the spread of political discourse in every reign. Even though it was able to develop and has bigger impact in the government politics, the existence of Varia was not more than a way to keep the company running.

Keywords: *development, roles, discourse, Varia.*

PENDAHULUAN

Memasuki masa Orde Baru ditandai dengan lengsernya Sukarno sebagai presiden dan dibubarkannya Partai Komunis Indonesia. Terjadinya transisi pemerintahan setelah peristiwa pemberotakan 1 Oktober 1965, akhirnya era pemerintahan baru pun dimulai. Terhitung sejak 12 Maret 1967 Mayor Jenderal Suharto naik ke tampuk kekuasaan sebagai pejabat presiden berkat adanya Ketetapan MPRS No. XXXIII/1967 (O. G. Roeder, 1969: 252). Di bawah pimpinan Suharto inilah pemerintahan Orde Baru akhirnya dimulai. Penyebutan Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Suharto di Indonesia sejak tahun 1966 (Ramdhan Budi Prastowo, 2011: 41).

Pada masa Suharto peran media begitu kentara. Di mana masa awal Orde Baru ini kehidupan pers mulanya dirasa sangat memberi angin segar kepada perusahaan penerbitan yang pada masa Sukarno banyak mendapatkan tekanan (Anjik Zulianto, Hamdan Tri Atmaja, dan R. Suharso, Vol. V, No. I, 2016: 5). Menurut Letnan Jenderal Ali Murtopo selaku Menteri Penerangan (1978-1983) sebagaimana dikutip dalam *Pers di Masa Orde Baru* karya David T. Hill menjelaskan bahwa kebebasan pers adalah mahkotanya Orde Baru (David T. Hill, 2011: 33). Hal tersebut juga bisa dilihat seperti munculnya Undang-undang No.11 Tahun 1966, yakni tentang ketentuan-ketentuan pokok pers.

Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu kondisi tersebut mengalami perubahan, di mana pemerintahan Orde Baru mengeluarkan beberapa peraturan terhadap pers yang semakin mempersulit kehidupan pers dibanding dengan kondisi pada masa Sukarno (Anjik Zulianto, Hamdan Tri Atmaja, dan R. Suharso, Vol. V, No. I, 2016: 6). Kebebasan pers yang ditawarkan oleh Orde Baru hanya manis di awal saja. Hal tersebut bisa dilihat dari adanya peraturan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Salah satu surat izin tersebut merupakan salah satu bentuk pengekangan pemerintah terhadap pers. Adanya SIUPP tersebut adalah bentuk nyata ke arah pelaksanaan kebebasan pers yang dikendalikan oleh pemerintah (Inge Hutagalung, Vol. II No. 2, 2013: 56). Selain itu, pada masa Orde Baru, pemerintah juga mengatur tentang keberadaan Surat Izin Terbit (SIT) di setiap perusahaan yang menerbitkan pers. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Orde Baru

mengendalikan dunia pers juga tercermin dengan adanya SIT di setiap lembaga penerbitan pers. Ketentuan mengenai SIT dalam undang-undang pokok pers diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Penerangan No. 03/Per/Menpen/1969, tanggal 27 Mei 1969 (Anjik Zulianto, Hamdan Tri Atmaja, dan R. Suharso, Vol. V, No. I, 2016: 6).

Adanya beberapa peraturan yang ditujukan kepada lembaga pers tersebut adalah bentuk bagaimana negara telah mengendalikan dunia pers. Dalam *Pers di Masa Orde Baru*, David T. Hill menulis pendapat Ariel Heryanto yang berkata bahwa, “media massa, termasuk pers khususnya media elektronik, jadi alat penting dalam memelihara dan membantu beranaknya legitimasi Orde Baru. Ini bisa dipahami, sebagai lembaga budaya pers Indonesia telah mengalami masa-masa keji penuh badai dalam perjalanan sebuah negara (Orde Baru)” (David T. Hill, 2011: 34). Dalam hal ini pemerintah Orde Baru berusaha menciptakan stabilitas politik dan keamanan setelah peristiwa 1965 (Ali Moertopo, 1973: 26).

Selain itu, pada masa Orde Baru di bawah pimpinan Suharto, keberadaan *Varia* justru semakin berkembang. Sejak peristiwa 30 September 1965 majalah hiburan ini mengalami peningkatan jumlah cetak. Selain itu, jumlah halaman pada majalah pun bertambah. Namun, berkembangnya majalah hiburan *Varia* pada masa Orde Baru pun juga tidak bisa lepas dari kepentingan politik penguasa. Adanya muatan atau konten-konten yang dibawakan oleh mingguan ini pun akhirnya juga memihak kepada Suharto selaku pemegang kekuasaan pada masa Orde Baru. Mulai dari beberapa berita tentang Orde Baru, hingga konten propaganda pun ditampilkan oleh majalah hiburan *Varia*.

Framing atau pembingkai berita yang dibawakan oleh majalah hiburan *Varia* mampu membuat eksistensinya dipertimbangkan. Selain itu, dalam hal analisis framing, keberpihakan *Varia* pada pemerintah merupakan salah satu bentuk *agenda setting* pada suatu media. Menurut Eriyanto dalam *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* menjelaskan bahwa analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana suatu media mengkonstruksi realitas. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media (Eriyanto, 2002: 11). Dalam hal ini, *Varia* alih-alih

menjadi malajah hiburan saja, perannya dalam menyebarkan berita, wacana, kebijakan dan propaganda pemerintah begitu dominan. *Agenda setting* yang ditampilkan oleh majalah hiburan ini tidak bebas nilai. Di mana dengan mengikuti dan berpihak terhadap arus utama pemerintahan adalah cara untuk bertahan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sejarah yang digunakan dalam penulisan ini meliputi empat tahap yang bertujuan untuk merekonstruksi suatu peristiwa. Kuntowijoyo menjelaskan empat tahap penelitian sebagai berikut. (Kuntowijoyo, 2013: 73-77). Pada tahap pertama peneliti ini memperoleh sumber primer berupa publikasi resmi berupa majalah *Varia*, 20 Agustus 1958, No. 18 TH. I. dan *Varia*, 23 November 1960, No. 136, TH. III yang berisi terkait data primer. Setelah sumber primer dan sekondr diperoleh kemudian masuk tahap verifikasi.

Kritik sumber atau verifikasi merupakan langkah yang dilakukan setelah peneliti memperoleh sumber-sumber yang akan digunakan dalam penelitian. Kritik eksteren dilakukan untuk menguji keaslian sumber sejarah yang digunakan. Kritik intern berkaitan dengan kredibilitas sumber sejarah untuk memastikan bahwa sumber yang diperoleh memang merupakan sumber yang dicari. Tahapan selanjutnya adalah interpretasi untuk mendapatkan makna dan keterkaitan atau hubungan antara fakta-fakta. Langkah terakhir yang dilakukan dalam penelitian sejarah yaitu historiografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Majalah Hiburan *Varia* pada Pemerintahan Suharto

Majalah hiburan *Varia* pada masa Suharto tetap mampu membuat roda perusahaan berputar. Padahal, ketika Suharto mulai berkuasa banyak media yang dilarang. Pelarangan media tersebut karena dianggap mengganggu kepentingan nasional. Sebanyak 46 dari 163 surat kabar ditutup tanpa alasan yang jelas (David T. Hill, 2011: 34). Penutupan surat kabar tersebut tidak lain diduga terkait atau jadi simpatisan PKI. Adanya peristiwa 30 September 1965 telah membuat banyak surat kabar izin terbitnya dicabut. Menurut David T. Hill dalam *Pers di Masa Orde Baru*,

menjelaskan bahwa banyaknya penutupan terhadap perusahaan media dilakukan lantaran karena sederetan surat kabar diduga terkait atau jadi simpatisan PKI dan *onderbouw*-nya (David T. Hill, 2011: 34). Selain itu, pada masa tersebut memang menandakan suatu kejadian atau peristiwa yang kelam dalam sejarah Indonesia, termasuk dalam dunia pers. Adanya sederetan peristiwa penangkapan dan pembunuhan sejumlah jurnalis, baik yang komunis sejati maupun sekadar simpatisan, menjadi kepingan-kepingan rangkaian teka-teki seputar pembantaian massal yang terjadi di berbagai wilayah pedesaan pada tahun 1965-1966 (David T. Hill, 2011: 34).

Setahun kemudian muncul Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Prinsip-prinsip Dasar Pers menyatakan bahwa pers nasional tidak dapat disensor atau dikendalikan dan kebebasan pers dijamin sebagai bagian dari hak-hak dasar warga negara serta penerbitan tidak memerlukan surat izin apa pun (David T. Hill, 2011: 35). Orde Baru di bawah pimpinan Suharto memanfaatkan adanya undang-undang No. 11 Tahun 1966 sebagai alat legitimasi pada masa awal-awal ia berkuasa. Pemerintah Orde Baru akhirnya mengeluarkan beberapa peraturan terhadap pers yang terbit di Indonesia. Seperti dijelaskan oleh Anjik Zulianto dalam “Perkembangan Persurat Kabar Suara Merdeka di Semarang Tahun 1950-2005”, bahwa peraturan baru tersebut misalnya seperti dikeluarkannya jargon pers Pancasila, konsep pers/jurnalisme pembangunan, kemitraan pers pemerintah masyarakat, dan lain-lain (Anjik Zulianto, Vol V, No. I, 2016: 5).

Menurut Suharto dalam *Amanat Kenegaraan I*, menjelaskan bahwa berdirinya Orde Baru tidak ada alasan lain kecuali untuk membangun kembali struktur kehidupan rakyat, bangsa dan negara. Semua harus kembali berlandaskan penerapan semurni-murninya Pancasila dan UUD 1945 (Suharto, 1985: 7). Selain itu, semua bentuk legitimasi kekuasaan Orde Baru tentu bermula sejak tahun 1965. Tahun tersebut merupakan masa terburuk sepanjang sejarah pers Indonesia merdeka (David T. Hill, 2011: 33). Pembredelan surat kabar dalam sejarah Indonesia secara besar-besaran terjadi pada tahun tersebut.

Menurut Inge Hutagalung dalam *Dinamika Sistem Pers di Indonesia*, menjelaskan bahwa pada era Suharto, pers dinyatakan sebagai salah satu media

pendukung keberhasilan pembangunan. Bentuk dan isi pers Indonesia perlu mencerminkan bentuk dan isi pembangunan (Inge Hutagalung, Vol. II No. 2, 2013: 56). Bentuk penyetiran pers pada masa awal Orde Baru sangat begitu kentara. Pada masa ini ini pers sangat tidak diharapkan memuat pemberitaan yang dapat ditafsirkan bertentangan dengan program pemerintah Orde Baru. Tanggung jawab pers bukan pada masyarakat melainkan pada penguasa Orde Baru (Inge Hutagalung, Vol. II No. 2, 2013: 56). Selain itu, pemerintahan Orde Baru menganggap pers yang bebas akan dapat mengganggu stabilitas negara, keamanan, dan kepentingan umum. Oleh sebab itu, maka laju kebebasan pers harus dikontrol dengan ketat (Inge Hutagalung, Vol. II No. 2, 2013: 56). Pengontrolan terhadap dunia pers pada masa Orde Baru adalah bentuk pengekangan negara terhadap kebebasan pers.

Akan tetapi, dengan adanya bentuk kontrol hingga pembredelan terhadap pers yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru tidak begitu berpengaruh terhadap majalah hiburan *Varia*. Majalah *Varia* sebagai media hiburan tetap menunjukkan eksistensinya dan mampu menyirkulasikan setiap terbitan. Seperti terlihat pada tahun 1967 misalnya. Pada tahun tersebut *Varia* tetap rutin terbit setiap minggunya. Majalah hiburan yang terbit hari Rabu ini tetap diminati oleh masyarakat di bawah rezim Orde Baru. Bertahannya *Varia* sebagai salah satu media hiburan di Indonesia tentu tidak lepas dengan politik arus utama pemerintahan. Dengan terjadinya transisi pemerintahan setelah pemberontakan tanggal 1 Oktober 1965 dan perpindahan kekuasaan ke Mayor Jenderal Suharto pada tanggal 11 Maret 1966, pemerintah Orde Baru memangkas retorika ‘revolusioner’.

Adanya pemangkasan retorika ‘revolusioner’ tersebut demi seruan yang lebih moderat agar industri pers menjaga keamanan nasional dari ancaman-ancaman dari dalam dan luar negeri untuk bertindak dengan kesadaran sebagai ‘pengawal Pancasila’, lima prinsip-prinsip ideologis bangsa (David T. Hill, 2011: 6). Demi mendorong upaya menjunjung tinggi ideologi umum Pancasila, pemerintahan Suharto berusaha untuk menghilangkan organ-organ partai atau surat kabar-surat kabar yang kritis, menjinakkan pers pembuat kegaduhan, dan memastikan bahwa para pekerja dan pihak manajemen pers bertanggung jawab secara mutlak pada

pemerintah (David T. Hill, 2011: 6). Pada waktu yang sama terdapat pemikiran bahwa tepat kiranya untuk meniadakan istilah-istilah tertentu yang diambil dari ungkapan masa Sukarno-terutama kata “revolusi”-yang tidak cocok lagi dengan pandangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (David Jenkins, 2010: 6).

Pada masa Orde Baru ini pemegang otoritas untuk semua urusan pers adalah Menteri Penerangan yang duduk di puncak institusi kuat pemerintah bernama Departemen Penerangan (David T. Hill, 2011: 71). Masih menurut David T. Hill dalam *Pers di Masa Orde Baru*, bahwa wewenang untuk mengatur dan memantau organisasi pers ini juga ada di tangan Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika. Selain berperan sebagai saluran peran serta pekerja industri pers dalam aneka pengambilan keputusan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika juga dapat memastikan agar organisasi-organisasi pers yang semestinya ‘independen’ dan ‘profesional’ tetap tunduk pada pemerintah (David T. Hill, 2011: 71).

Pada masa pemerintahan Suharto majalah hiburan *Varia* justru semakin berkembang. Majalah hiburan *Varia* sejak peralihan kekuasaan dari Sukarno ke Suharto justru meningkatkan jumlah oplahnya. Peningkatan jumlah oplah dan stabilnya harga majalah mingguan ini tentu bukan tanpa sebab. Keberpihakan kepada pemerintahan Suharto adalah kunci majalah hiburan ini bisa tetap hidup dan berkembang. Hal ini seperti terlihat pada kover depan majalah *Varia* edisi 12 April 1967. Di mana kover depan dari majalah hiburan *Varia* ini menampilkan Suharto beserta istrinya Siti Hartinah secara penuh (*Varia*, 12 April 1967, No. 469, TH. X, hlm. kover depan). Padahal, sejak pertama kali terbit pada 23 April 1958, mayoritas sampul depan dari majalah hiburan *Varia* adalah perempuan. Namun, ada hal yang beda pada edisi tersebut. Secara langsung majalah hiburan *Varia* telah menunjukkan sikapnya untuk mendukung penuh pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Suharto.

Pada tahun 1967 inilah majalah hiburan *Varia* banyak menampilkan konten-konten yang sarat akan kepentingan pemerintahan Orde Baru. Sebab, pada tahun tersebut Orde Baru sedang dalam tahap pengenalan dan perlu legitimasi yang kuat. Pada tahun 1967 tersebut *Varia* telah ikut menyemarakkan pemerintahan yang baru.

Konten yang dibawakan pun cenderung bernuanasa baru. Seperti terlihat pada edisi 5 Juli 1967. Dalam edisi tersebut *Varia* mengulas tentang perayaan provinsi Jambi yang menyambut dan dalam suasana Orde Baru. Provinsi Jambi, seperti yang dijelaskan pada keterangan pada foto, sedang dalam suasana Orde Baru yang tengah giat membangun daerah sebagaimana layaknya daerah tingkat I lainnya pada waktu itu. Selain itu, dalam edisi tersebut juga terdapat foto adanya massa aksi yang menuntut agar Sukarno segera turun dari kekuasaan (*Varia*, 5 Juli 1967, No. 481, TH. X, hlm. 32). “Propinsi Djambi dalam suasana Orde Baru ini tengah giat membangun daerahnja se bagaimana lajaknja daerah Tingkat I lainnja. Seperti diketahui Pemerintah Daerah Djambi kini telah berusaha memperbaiki dja lan² ekonomi dalam daerahnja dan kemudian dilandjutkan dengan daerah² Propinsi jang terdekat.” (*Varia*, 5 Juli 1967, No. 481, TH. X, hlm. 32).

Kemudian pada bulan selanjutnya, tepatnya pada edisi 2 Agustus 1967, *Varia* menampilkan konten yang berjudul “Dialog dengan Pak Harto”. Dalam konten edisi tersebut Suharto sebagai presiden Republik Indonesia saat forum pertemuan membicarakan beberapa hal, yakni tentang dunia pers dan permasalahan pengangkatan Roeslan Abdulghani. Dari dunia pers, Suharto mengakui bahwa pers sangatlah penting dan punya pengaruh yang besar. Menurut Suharto bahwa dalam pembinaan Orde Baru pers bisa memainkan rolnya yang menentukan. Selain itu, menurut pemimpin tertinggi Orde Baru tersebut menyebutkan bahwa peran pers diharapkan untuk menentukan bagi suksesnya pelaksanaan demi kemenangan Orde Baru. Sedangkan, percakapan selanjutnya mengenai Roeslan Abdulghani dikarenakan pengangkatannya sebagai wakil tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuai kontroversi. Sebab, Roeslan Abdulghani tidak bisa dilepaskan perannya pada saat masa pemerintahan Sukarno. Di mana dia dianggap berpengaruh terhadap Manipol/Usdek sebagai doktrin haluan negara dan dikhawatirkan akan melakukan penyelewengan dari dasar-dasar Pancasila (*Varia*, 2 Agustus 1967, No. 485, TH. X, hlm. 1).

Pada edisi berikutnya, yakni 9 Agustus 1967, *Varia* pada halaman pertama majalah masih menampilkan konten dialog dengan Suharto. Dialog pada edisi sebelumnya merupakan sesi pertama, sedangkan pada 9 Agustus 1967 ini

merupakan sesi kedua. Dalam sesi dialog kedua tersebut majalah hiburan *Varia* memberi judul “Beberapa Tjataan Kita”. Beberapa ulasan dalam dialog tersebut seperti tentang penegasan tentang perbedaan antara Orde Lama di bawah pimpinan Sukarno dengan masa Orde Baru di bawah pimpinan Suharto. Dalam artikel yang dimuat *Varia* pada edisi tersebut menyebutkan bahwa kalau Orde Lama dulu menyelewengkan Pancasila via Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis), dan adanya penumpukan kekuasaan di tangan satu orang bernama Sukarno (*Varia*, 9 Agustus 1967, No. 486, TH. X, hlm. 1).

Masih dalam bulan yang sama, tepatnya pada edisi 16 Agustus 1967, *Varia* terbit dengan edisi spesial 22 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pada edisi tersebut kover depan majalah terpampang Suharto dan A. H. Nasution berpakaian lengkap tentara dengan latar belakang Istana Merdeka. Seperti ditulis oleh Hadely Hasibuan selaku Pemimpin Umum *Varia*, bahwa gambar Suharto dan Nasution dengan latar belakang Istana Merdeka adalah lambang kemerdekaan nasional (*Varia*, 16 Agustus 1967, No. 487, TH. X, hlm. 1). Hadely Hasibuan lebih lanjut dalam tulisannya berjudul “Sekali Merdeka, Tetap Merdeka”, menjelaskan bahwa gambar kover depan pada edisi 16 Agustus 1967 tersebut bagaikan pencerminan dari keyakinan bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia masih mempunyai Suharto, Nasution, dan masih banyak lagi.

Selain itu, masih ada yang menarik pada edisi khusus di momen 22 tahun kemerdekaan Indonesia tersebut. Sukarno dalam edisi tersebut diperolok sebagai presiden yang angkuh, gemar sanjungan, tukang jual janji yang suka kemewahan. Sementara, Suharto sebagai tokoh Orde Baru dianggap sederhana, tak banyak omong, lembut, tegas, dan pancasilais (*Varia*, 16 Agustus 1967, No. 487, TH. X, hlm. 1). Konten pada hari perayaan kemerdekaan Indonesia tersebut begitu kental akan sarat kepentingan politik. *Varia* seakan-akan telah dibuat tidak berdaya oleh kekuasaan Orde Baru.

Pada halaman ini kita siarkan gambar Bung Karno, pemimpin utama ORLA¹ pada saat-saat terakhir kekuasaannya dan gambar Pak Harto, pemimpin utama

¹ORLA adalah akronim dari Orde Lama yang menggambarkan masa kekuasaan Sukarno sebagai Presiden di Indonesia.

ORBA, jang kini sedang giat berusaha mensukseskan Orba dalam segala lapangan, sesudah Orla (dan semua antek²nja) dihantjurkan.

Pada hari perjaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sekarang ini seluruh rakjat Indonesia pendukung Orde Baru memandjatkan do'a kehadiran Illahi semoga ORLA akan hantjur untuk se-lama²nja dan semoga ORBA akan sukses dalam segala usahanja untuk menegakkan Kebenaran, Keadilan, dan Kebahagiaan diatas bumi Indonesia (*Varia*, 16 Agustus 1967, *op.cit.*, hlm. 4).

Dalam laporan tersebut terlihat jelas betapa subjektifnya *Varia* sebagai media. Alih-alih menggunakan basis data yang kuat, majalah hiburan tersebut sibuk menggiring opini publik untuk memberikan citra positif kepada Orde Baru. Bahkan, dari konten yang dimuat *Varia* pada edisi perayaan kemerdekaan Indonesia tersebut terkesan agitatif. Dengan model penulisan seperti itu, *Varia* sudah menunjukkan bagaimana bentuk propagandanya yang disebarkan kepada masyarakat Indonesia. Dengan didukung oleh kekuatan Orde Baru, propaganda pada edisi Agustus 1967 tersebut mampu meyebar dengan oplah sebanyak 60.000 eksemplar ke seluruh Indonesia. Hal tersebut tentu bukan jumlah yang sedikit pada masa itu.

Dalam edisi spesial perayaan 22 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini *Varia*, alih-alih memuat konten hiburan, justru majalah ini banyak menampilkan muatan-muatan politis. Mulai dari halaman kover, sampai halaman-halaman awal majalah hanya memuat ulasan-ulasan mengenai para tokoh politik. Mulai dari Sukarno, Mohammad Hatta, Suharto, A. H. Nasution, Husni Thamrin, S.K. Trimurti, Mochtar Lubis, dan H. B. Jassin. Beberapa tokoh yang ditampilkan oleh *Varia* pada halaman awal tentu bukan tanpa sebab. Di mana beberapa tokoh tersebut diminta untuk memberi ulasan seputar 22 tahun kemerdekaan Indonesia. Khusus Mochtar Lubis dan H.B. Jassin mereka berdua mengulas hal yang berbeda. Mochtar Lubis sebagai seorang wartawan memberi ulasan tentang kebebasan pers yang harus disertai tanggung jawab pada masa Orde Baru. Sedangkan, H.B. Jassin sebagai seorang kritikus sastra memberi gambaran perjalanan dunia sastra di Indonesia selama 22 tahun merdeka (*Varia*, 16 Agustus 1967, *op.cit.*, hlm. 8-9).

Pada tahun 1967 wacana tentang legitimasi rezim Orde Baru memang sedang gencar dilakukan. Salah satunya adalah wacana antikomunis misalnya. Baskara T. Wardaya dalam *Menguak Misteri Kekuasaan Orde Baru* (2009) menjelaskan

bahwa peran media mampu melanggengkan citra positif dan heroik Suharto. Kontrol pemerintah yang begitu masif terhadap media memungkinkan pemerintah dengan leluasa mengisikan muatan-muatan kepentingannya. Orde Baru menundukkan relasi saling mengkait yang pelik antara kekanan keamanan dan undang-undang tangan besi yang mengendalikan pers (David T. Hil, 2011: 2). Selain itu, pada masa Orde Baru, media massa sendiri sengaja diatur oleh Suharto untuk memiliki fungsi ganda atau berwajah dua. Fungsi yang pertama dari media massa saat itu ialah menjadi industri yang mampu mendongkrak kemajuan iklim investasi ke arah yang lebih baik. Sedangkan, fungsi kedua dari media massa pada pemerintahan Suharto yakni menjadi partner pembangunan bagi pemerintah (Dwi Wahyono, Vol. 1, No. 1, 2012: 45).

Memasuki tahun selanjutnya, tepatnya pada edisi 22 April 1970 majalah hiburan *Varia* genap berusia 12 tahun. Pada edisi tersebut Hadely Hasibuan selaku Pemimpin Umum *Varia* menulis editorial di halaman pertama dengan judul “*Varia* 12 tahun: sambil berenang minum air”. Menurut Hadely Hasibuan, bahwa *Varia* yang pertama kali terbit sejak 23 April 1958 dilahirkan dalam suasana suram dan serba sukar. Selain itu, dalam tulisannya pada edisi tersebut, Hadely Hasibuan masih menegaskan bahwa majalah *Varia* masih tetap menjadi majalah hiburan.

Meskipun sudah berusia 12 tahun, majalah *Varia* tetap pada semboyannya sejak pertama kali terbit. Semboyan sejak pertama kali terbit tersebut berbunyi: “Berusaha terus menuju perbaikan dan kesempurnaan.” Semboyan tersebut tidak berubah hingga usianya yang ke-12 tahun (*Varia*, 22 April 1970, No. 627, TH. XII, hlm. 3). Selain itu, pada edisi spesial 12 tahun tersebut terdapat kutipan dari tulisan Hadely Hasibuan terkait sikapnya pada majalah *Varia*: “Kami sengadja menerbitkan madjalah ini sebagai madjalah hiburan, karena kami lebih mementingkan HARI ESOK daripada HARI KEMARIN. Kami bersikap demikian, karena kami yakin, bahwa, berkat usaha kita bersama, masa-depan bangsa kita akan lebih baik daripada masa-lampaunja.” (*Varia*, 22 April 1970, No. 627, TH. XII, hlm. 3).

Pada tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1972 *Varia* masih dengan konsisten menyoroti tentang kebijakan dari pemerintahan Orde Baru. Kali ini pada

edisi 17 Mei 1972, *Varia* memuat editorial yang berjudul “Perumahan untuk Rakyat”. Kebijakan adanya perumahan untuk rakyat tersebut sesuai dengan anjuran Suharto. Dalam tulisan tersebut presiden kedua Republik Indonesia menganjurkan supaya ditemukan cara tepat dalam menyelenggarakan usaha pembangunan perumahan rakyat. Adanya pembangunan perumahan tersebut tidak lain dikarenakan untuk meningkatkan perekonomian pada masyarakat. Apalagi pada waktu itu di Indonesia sudah terdapat adanya beberapa bahan bangunan yang memenuhi syarat kesehatan, cukup kuat dan murah (*Varia*, 17 Mei 1972, No. 735, TH. XV, hlm. 3).

Pada akhirnya, konten citra positif Suharto selalu digambarkan dalam salah satu bentuk agitasi Orde Baru pada majalah hiburan *Varia*. Dengan tirus hingga sebanyak 60.000 eksemplar pada masa awal pemerintahan Orde Baru, *Varia* yang terbit saban hari Rabu ini mampu menjadi salah satu corong politik propaganda penguasa. Majalah di bawah pimpinan Hadely Hasibuan yang terbit pertama kali pada 23 April 1958 tersebut telah ikut menjadi saksi perjalanan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Dari rezim Sukarno hingga peralihan ke rezim Suharto majalah hiburan *Varia* mampu bertahan dengan mengikuti arus utama setiap kebijakan pemerintahan.

B. Peran Hadely Hasibuan sebagai Pemimpin Umum Majalah Hiburan *Varia*

Perkembangan majalah hiburan *Varia* memang tidak bisa lepas dari peran pemimpinnya. Majalah *Varia* yang dipimpin oleh Hadely Hasibuan dari masa Sukarno sampai Suharto getol menyebarkan beberapa kebijakan pemerintah. Hadely Hasibuan sendiri merupakan orang dari latar belakang sarjana hukum. Sebelum mendirikan *Varia*, orang kelahiran 20 Januari 1920 tersebut juga pernah aktif sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Seperti wartawan *Pewartu Deli* di Medan (1939-1941), wartawan *Sumatra Shinbun* (1941-1944), Pemimpin Redaksi *Tapanuli Shinbun* di Tarutung (1944-1945), wakil pimpinan redaksi harian “*Berjuang*” di Medan (1945-1946), penasihat dan anggota redaksi “*De Javabode*” di Jakarta (1955-1956), Wakil Pemimpin Redaksi harian “*Nieuwgier*” di Jakarta

(1956-1958), dan Pemimpin Umum majalah hiburan “Varia” di Jakarta (1958-1976) (Hadely Hasibuan, 1985: 96).

Pemimpin Umum majalah hiburan *Varia* ini sejak 1950 sampai awal Orde Baru berkuasa tidak pernah terikat suatu partai politik mana pun. Hal ini diakuinya sendiri dalam salah satu buku autobiografinya *Pengalamanku sebagai Calon Menteri Penurunan Harga*. Menurut Hadely, ia tidak terikat sama parta politik mana pun, kecuali dalam dua kali pemilihan umum yang terakhir (terhitung sebelum 10 Juni 1985) ia selalu memilih Golkar (Hadely Hasibuan, 1985: 98). Sikap politik dari Pemimpin Majalah *Varia* ini secara langsung berpengaruh ke dalam muatan majalah hiburan yang dipimpinnya. Meski sejak tahun 1950 Hadely menyatakan independen, namun nyatanya ketika memimpin *Varia* ia tidak bisa lepas dari campur tangan kekuasaan.

KESIMPULAN

Majalah hiburan *Varia* yang terbit sejak 23 April 1958 merupakan salah satu representasi majalah hiburan yang tidak bisa lepas dari pengaruh politik kekuasaan. Nuansa politik kian terlihat dua tahun pasca majalah tersebut mulai diterbitkan, tepatnya pada tahun 1960. Kemudian sejak masa peralihan kekuasaan dari Sukarno ke Suharto keberadaan majalah hiburan *Varia* justru semakin berkembang. Padahal, beberapa tahun sebelumnya sebelum peralihan kekuasaan, *Varia* getol menyebarkan kebijakan pemerintahan Sukarno. Selain itu, adanya peran sentral dari Hadely Hasibuan selaku Pemimpin Umum majalah hiburan *Varia* tentu menjadi salah satu penyebab majalah hiburan tersebut mampu bertahan di bawah pemerintahan Suharto.

Selain ikut mendukung Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru, sikap dari majalah hiburan *Varia* ini pun terlihat kemudian ikut menjelek-jelekkkan pemerintahan sebelumnya. Seperti terlihat pada edisi perayaan 22 tahun kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut dilakukan tentu menjadi sikap *Varia* dalam mendukung pemerintahan Suharto. Dengan mendukung pemerintahan yang baru tersebut, eksistensi majalah hiburan *Varia* semakin terlihat. Selain itu, hal tersebut telah menjadikan majalah hiburan ini sebagai majalah yang selalu mencari

keuntungan pada setiap zaman, baik Sukarno maupun Suharto. Terkait hal tersebut dapat kita lihat dari muatan-muatan tiap edisi yang selalu ada nuansa politis. Begitulah cara majalah hiburan *Varia* beradaptasi untuk bertahan dalam menghidupi roda ekonomi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Varia, 20 Agustus 1958, No. 18 TH. I.

Varia, 26 Oktober 1960, No. 132, TH. III.

Varia, 23 November 1960, No. 136, TH. III.

Varia, 27 Oktober 1965, No. 393, TH. VIII.

Varia, 12 April 1967, No. 469, TH. X.

Varia, 24 Mei 1967, No. 475, TH. X.

Varia, 31 Mei 1967, No. 476 TH. X.

Varia, 5 Juli 1967, No. 481, TH. X.

Varia, 2 Agustus 1967, No. 485 TH. X.

Varia, 9 Agustus 1967, No. 486 TH. X.

Varia, 16 Agustus 1967, No. 487 TH. X.

Varia, 22 Oktober 1969, No. 601, TH. XII.

Varia, 22 April 1970, No. 627, TH. XII.

Varia, 1 September 1971, No. 698, TH. XIV.

Varia, 17 Mei 1972, No. 735 TH. XV.

Buku

Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta, CSIS, 1973.

Baskara T. Wardaya, *Menguak Misteri Kekuasaan Orde Baru* 2009.

- Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Hadely Hasibuan, *Pengalamanku sebagai Calon Menteri Penurunan Harga*, Jakarta: Penerbit Yayasan Pratama Sari, 1985.
- Hill, David T., *Pers di Masa Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indoneia, 2011.
- Jenkins, David. *Suharto & Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975-1983*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2010.
- Jones, Tod. *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya selama Abad Ke-20 hingga Era Reformasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; KITLV-Jakarta, 2015.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Roeder, O. G., *Suharto: Dari Pradjurit Sampai Presiden*, Jakarta: Gunung Agung, 1969.
- Suharto, *Amanat Kenegaraan I 1967-1971 Jilid II* Jakarta: Inti IndayuPress, 1985.

Jurnal

- Anjick Zulianto, Hamdan Tri Atmaja, dan R. Suharso, “Perkembangan Persurat Kabar Suara Merdeka di Semarang Tahun 1950-2005”, *Journal of Indonesian History*, (Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia), Vol. V, No. I, 2016.
- Dwi Wahyono, Gayung Kasuma, “Propaganda Orde Baru 1966-1980”, *Jurnal Verleden*, Vol. 1, No. 1, Desember 2012:1-109.
- Inge Hutagalung, “Dinamika Sistem Pers di Indonesia”, *Jurnal Interaksi*, Vol. II No. 2, Juli 2013: 53-60.

Skripsi

- Ramdhan Budi Prastowo, “Muncul dan Perkembangannya Surat Kabar Pikiran Rakyat Sampai Awal Orde Baru di Bandung (1950-1974)”, *Skripsi*, Yogyakarta: jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial UNY, 2011.